



## KEMANDIRIAN KEPEMIMPINAN KIM JONG UN : ANALISIS KEBIJAKAN- KEBIJAKAN STRATEGIS DALAM MENGUATKAN NEGARA KOREA UTARA

Armah<sup>1</sup>, Halimah<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Darussalam Martapura

[armaharmah69@gmail.com](mailto:armaharmah69@gmail.com)  
[halimahimaa1209@gmail.com](mailto:halimahimaa1209@gmail.com)

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan kepemimpinan Kim Jong-un sebagai pemimpin dalam memperkuat stabilitas dan kekuatan negara Korea Utara. Kim Jong-un adalah pemimpin ketiga Korea Utara yang memegang jabatan sejak tahun 2011 hingga sekarang. Sebagai pemimpin tertinggi, Kim Jong-un menerapkan pendekatan yang berfokus pada penguatan ideologi Juche, kekuatan militer, gencatan senjata nuklir dan peningkatan ekonomi dalam menghadapi tantangan global. Setiap negara memiliki kepemimpinan dengan gaya dan pendekatan kepemimpinan yang berbeda-beda dalam mengembangkan negara nya. Salah satunya adalah pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un yang dikenal dengan gaya kepemimpinan otoriter nya. Kepemimpinan Korea Utara mengutamakan kemandirian dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan yang strategis untuk memperkuat negara. Secara keseluruhan, kebijakan strategis Kim Jong-un berperan penting dalam menjaga ketahanan negara, memperkuat legitimasi kekuasaannya, dan memastikan Korea Utara tetap berdiri kokoh di Tengah tekanan internasional.*

**Kata kunci:** Kebijakan; Kepemimpinan; Kim Jong-un

### Abstract

*This research aims to examine Kim Jong-un's leadership policies as a leader in strengthening the stability and strength of the North Korean state. Kim Jong-un is the third leader of North Korea who has held office from 2011 until now. As supreme leader, Kim Jong-un implemented an approach that focused on strengthening Juche ideology, developing military power, a nuclear ceasefire and improving the economy in facing global challenges. Each country has leadership with different leadership styles and approaches in developing their country. One of them is the leader of North Korea, Kim Jong-un, who is known for his authoritarian leadership style. North Korean leadership prioritizes independence in every strategic decision and policy making to strengthen the country. Overall, Kim Jong-un's strategic policies play an important role in maintaining the country's resilience, strengthening the legitimacy of his rule, and ensuring that North Korea remains strong amidst international pressure.*

**Keywords:** Policy; Leadership; Kim Jong-un

### PENDAHULUAN

Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mengarahkan, mempengaruhi, dan mengawasi jalannya Pelaksanaan tugas dilaksanakan sesuai

dengan rencana yang telah disusun. Seorang pemimpin menggunakan kekuasaannya yang dimiliki untuk melaksanakan rancangan dan mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sistem merupakan rangkaian bagian yang saling berhubungan dan disusun berdasarkan pola tertentu untuk mencapai untuk mencapai tujuan bersama. Hukum sebagai salah satu sistem aturan kehidupan sosial yang terdiri dari bagian-bagian yang terhubung dan saling bergantung dalam organisasi yang terintegrasi. Setiap negara memiliki pemimpin dengan gaya kepemimpinan yang beragam untuk memajukan negaranya, seperti Kim Jong-un adalah pemimpin Korea Utara, yang sedang menjabat sejak tahun 2011 hingga saat ini. Korea Utara resmi berdiri pada 9 September 1948 dengan ibu kota di Pyongyang, dipimpin oleh Kim Il-Sung (1912-1994), Kim Jong-Il (1941-2011), dan saat ini oleh Kim Jong-un. Kepemimpinan adalah faktor penting yang mempengaruhi citra sebuah negara di dunia. Korea Utara dikenal sebagai negara yang mempertahankan nilai, watak, dan pemikiran nasionalnya yang masih murni, tanpa banyak pengaruh dari negara lain, serta berpegang pada prinsip berkepribadian mandiri tanpa bergantung pada pihak lawan. Sistem pemerintahannya yang cenderung komunis tradisional memperkuat pengaruh Kim Jong-un dalam memimpin negara tersebut, sebagaimana yang sudah diterapkan oleh ayah dan kakeknya yang cenderung otoriter. Salah satu aspek lain dari otoritarianisme ini adalah penghormatan yang hampir menyerupai pengkultusan terhadap pemimpin tertinggi pertama Korea Utara, Kim Il-Sung, dan putranya Kim Jong-Il. Penghormatan ini dilakukan secara terorganisasi oleh negara, termasuk pemberian gelar abadi kepada keduanya. Korea Utara menyatakan dirinya sebagai negara Juche, yang berarti negara yang percaya dan bergantung pada kekuatannya sendiri. Ideologi Juche adalah doktrin resmi yang diikuti oleh negara ini, pada masa pemerintahan Kim Il-Sung ideologi juche ini berfungsi sebagai sarana pengendalian politik yang dirancang untuk menghindari pengaruh luar yang dapat membahayakan kekuasaan Kim Il-Sung pada waktu itu. <sup>1</sup> Selain itu, pemimpin Korea Utara juga sangat berambisi untuk mengembangkan senjata nuklir di wilayahnya. Kim Jong-un berusaha memperkuat posisi Korea Utara sebagai kekuatan militer global. Strategi ini meliputi pengembangan jumlah senjata nuklir dan diversifikasi kemampuan serangan, sebagai tanggapan atas ancaman dari Amerika Serikat dan para sekutunya. Kim Jong-un menghadapi tantangan global signifikan dalam upaya memperbaiki ekonomi negaranya yang tertekan akibat sanksi internasional, isolasi politik dan berbagai hambatan internal. Kepemimpinan Kim Jong-un sejak 2011 membawa perubahan besar dalam kebijakan strategis Korea Utara, terutama terkait kemandirian nasional. Dengan menerapkan kebijakan Byungjin, Kim menekankan pengembangan nuklir dan ekonomi secara bersamaan, yang bertujuan memperkuat posisi negara di tingkat internasional. Upaya ini juga terlihat dari langkah-langkah untuk mengurangi ketergantungan pada bantuan

---

<sup>1</sup> Melysa Arda Yusmita et al., "PRESIDEN KOREA UTARA," 2013, 1–16.

asing dan meningkatkan kapasitas produksi domestik. Melalui analisis kebijakan ini, artikel ini akan mengeksplor bagaimana strategi-strategi tersebut membentuk identitas dan kekuatan negara Korea Utara di era modern. Kebijakan yang diputuskan oleh Kim Jong-un berfokus pada pembangunan mandiri di bidang ekonomi, militer dan teknologi, meskipun menghadapi keterbatasan sumber daya dan krisis yang terus berlangsung.<sup>2</sup>

## **BAHAN DAN METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan fokus utama pada analisis fenomena terkait Kim Jong-un, khususnya kemandirian kepemimpinannya dan kebijakan yang diambil. Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan data deskriptif melalui analisis mendalam terhadap data yang telah diperoleh. Data tersebut kemudian dianalisis untuk menemukan keterkaitan dan perannya dalam mendukung penelitian ini. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder, yang diperoleh melalui studi pustaka dengan sumber dari buku, artikel jurnal, dan informasi relevan dari internet yang sesuai dengan topik penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **BIOGRAFI KIM JONG-UN**

Kim Jong-un adalah pemimpin Korea Utara saat ini dan merupakan putra bungsu dari Kim Jong-Il dan Ko Young-Hee. Ia lahir pada 8 Januari 1983 di Korea Utara, meskipun detail tentang masa kecilnya sebagian besar tetap tidak diketahui. Ibunya, Ko Young-Hee, adalah seorang vokalis opera, sedangkan ayahnya, Kim Jong-Il, memimpin Korea Utara sebagai pemimpin militer selama lebih dari satu dekade hingga wafatnya. Kakeknya, Kim Il-Sung, dihormati sebagai pendiri negara tersebut. Kim Jong-un diketahui menempuh pendidikan di sebuah sekolah internasional di Gumligen, dekat Bern, Swiss, pada periode 1993-1998, dengan menggunakan nama samaran seperti "Chol-Pak" atau "Pak-Chol". Ia kemudian melanjutkan studinya di sekolah Liebfeld Steinhölzli di Koniz, Swiss, dengan nama samaran "Pak Un" atau "Un Pak" dan disebut sebagai anak dari seorang pegawai kedutaan Korea Utara di Swiss. Pihak sekolah di Koniz mengonfirmasi keberadaan seorang siswa asal Korea Utara yang merupakan anak pegawai kedutaan pada periode tersebut, namun menolak memberikan informasi lebih lanjut mengenai identitasnya.

Setelah menyelesaikan proses pendidikannya di Swiss, Kim Jong-un melanjutkan studi di Universitas Kim Il-Sung, sebuah perguruan tinggi di Pyongyang yang berfokus pada pelatihan perwira, pada tahun 2002-2007. Selama masa remajanya, Kim Jong-un mulai terlibat dalam kegiatan militer dengan mendampingi ayahnya dalam inspeksi militer. Kim Jong-un dikabarkan berencana memulai kariernya di Partai Buruh Korea, partai yang memegang kekuasaan di negara

---

<sup>2</sup> Theofilus Jose Setiawan et al., "Pengayaan Senjata Nuklir Sebagai Modal Ekonomi Korea Utara," *Jurnal Dinamika Global* 6, no. 02 (2021): 212–31, <https://doi.org/10.36859/jdg.v6i2.640>.

tersebut, atau di Biro Politik Angkatan Darat, dua lembaga yang bertugas mengawasi pemerintahan. Pada tahun 2009, muncul laporan bahwa Kim Jong-un sedang dipersiapkan sebagai penerus ayahnya. Di tahun yang sama, ia juga terdaftar sebagai calon anggota Majelis Rakyat Agung. Kemudian pada bulan April, Kim Jong-un diberi posisi di Komisi Pertahanan Nasional (NDC) sebagai pemimpin, sebuah jabatan tertinggi di negara tersebut. Pada bulan Juni, kabar menyebutkan bahwa Kim Jong-un mendapatkan jabatan sebagai Kepala Departemen Keamanan Negara. Selanjutnya pada September 2010 ia diangkat menjadi jenderal bintang empat, meskipun belum jelas pengalamannya sebelumnya. Pengangkatan Kim Jong-un dipandang penting karena terjadi tidak lama sebelum pertemuan umum pertama Partai Buruh Korea (KWP) sejak 1980, ketika ayahnya, Kim Jong-Il, dipilih untuk menggantikan kakeknya, Kim Il-Sung. Ini semakin menegaskan bahwa Kim Jong-un dipersiapkan untuk menggantikan ayahnya. Setelah Kim Jong-Il wafat pada Desember 2011, Kim Jong-un diumumkan sebagai pemimpin tertinggi Korea Utara, sebuah gelar tidak resmi yang mencerminkan otoritasnya sebagai kepala pemerintahan dan militer negara tersebut. Pada April 2012, posisinya semakin kokoh dengan diperolehnya sejumlah gelar resmi, termasuk Sekretaris Pertama Partai Pekerja Korea, Ketua Komisi Militer Pusat, dan Ketua Komisi Pertahanan Nasional.

### **KONSEP KEMANDIRIAN DALAM KEPEMIMPINAN**

Korea Utara menerapkan sistem pemerintahan otoriter dengan satu partai yang dipimpin oleh keluarga Kim. Ideologi Juche merupakan hasil pemikiran Kim Il-sung tentang sistem pemerintahan yang dianggap sesuai untuk memperbaiki kondisi politik, ekonomi, dan sosial. Ideologi ini lahir sebagai respons terhadap situasi sosial politik Korea Utara yang tidak stabil setelah Perang Korea (1950-1953). Partisipasi politik sangat dibatasi, dan keputusan sepenuhnya terpusat pada pemerintah. Ideologi resmi negara ini adalah Juche, yang berarti kemandirian atau kemandirian nasional dan berfokus pada tiga aspek utama yang meliputi chaju (kedaulatan politik), charip (kemandirian ekonomi), dan chawi (kemampuan militer yang mandiri). Ideologi Juche dikembangkan oleh Kim Il-sung pendiri rezim Korea Utara dan menjadi dasar utama bagi negara tersebut. Beberapa prinsip utama Juche meliputi:

- a) Kemandirian Politik : Menekankan pentingnya kedaulatan dan pengambilan keputusan tanpa campur tangan asing.
- b) Kemandirian Ekonom : Pilar penting Juche adalah pengembangan pembangunan ekonomi nasional yang bebas dari ketergantungan pada negara lain dengan kontrol penuh pemerintah terhadap sektor ekonomi.
- c) Kemandirian Militer : Ideologi ini mengutamakan kekuatan militer untuk menjaga kedaulatan negara dengan konsep Songun yang menjadikan militer sebagai prioritas utama.

- d) Kemandirian Budaya : Juche mendorong pengembangan budaya nasional yang mencerminkan nilai-nilai Korea Utara sambil menolak pengaruh asing yang dianggap merusak.
- e) Pemimpin Tertinggi : Dalam ideologi ini pemimpin negara dianggap sebagai figur sentral. Kim Il-sung, Kim Jong-il, dan Kim Jong-un sebagai bagian dari garis keturunan keluarga Kim sehingga dipandang sebagai pemimpin tertinggi dengan peran utama tersebut.

Penerapan ideologi Juche membuat Korea Utara menjadi negara yang membatasi hubungan dengan dunia internasional, terutama terhadap pengaruh liberalisme dan kapitalisme. Juche juga sering disertai dengan pengkultusan pemimpin, dimana pemimpin dianggap memiliki peran penting dalam mewujudkan kemandirian dan keberlanjutan negara. Meskipun secara resmi menjadi dasar ideologi, beberapa pengamat berpendapat bahwa Juche digunakan untuk mempertahankan kekuasaan dan kontrol pemerintah. Sistem pemerintah dan ideologi suatu negara memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakatnya baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun biaya. Warga Korea Utara menghadapi berbagai pembatasan terhadap kebebasan pribadi dengan pemerintahan menerapkan kontrol ketat dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ekonomi juga sangat sulit ditambah dengan pembatasan akses terhadap informasi dunia luar yang sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah. Selain itu, warga tidak bebas bepergian bahkan untuk pindah antar kota sekalipun mereka harus memperoleh izin resmi dari pemerintah terlebih dahulu.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Juche terbukti meningkatkan rasa percaya diri masyarakat Korea Utara. Selain itu, indoktrinasi ideologi yang sangat kuat telah membuat rakyatnya merasa bangga dan mencintai Juche sebagai identitas nasional dan kebanggaan bangsa. Meskipun Korea Utara mengalami masa-masa sulit, warganya tetap setia mendukung pemerintah dan bersama-sama berupaya memajukan negara.<sup>3</sup>

### **KEBIJAKAN STRATEGIS**

Korea Utara menghadapi berbagai masalah terutama masalah ekonomi yang muncul setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1990-an. Sejak Uni Soviet bubar, Korea Utara kehilangan dukungan dari negara penerusnya Rusia, sementara bantuan dari Tiongkok juga minim. Akibatnya pendapatan negara menurun drastis menyebabkan kekurangan pangan, kelaparan, kematian akibat kelaparan, dan berbagai masalah lainnya. Korea Utara juga menghadapi keruntuhan sektor industri, kegagalan dalam kebijakan pertanian, serta ketidakseimbangan akibat pengeluaran militer yang sangat tinggi. Pemerintah Korea Utara hanya bergantung

---

<sup>3</sup> Agus Rustamana et al., "Menganalisis Perkembangan Kekinian Dari Negara Korea Utara Dan Korea Selatan," *Cendekia Pendidikan* 1, no. 1 (2023): 1–13, <https://doi.org/10.9644/scp.v1i1.332>.

pada ideologi juche (kemandirian) untuk membangun negaranya melalui pendekatan alternatif, yaitu dengan memproduksi senjata nuklirnya.<sup>4</sup>

Kebijakan luar negeri Korea Utara mencerminkan langkah, respons, dan interaksi yang selaras dengan strategi nuklir untuk melindungi negara dari ancaman luar serta menjaga kestabilan ekonomi. Krisis nuklir yang dipicu oleh Korea Utara telah mendorong negara-negara di sekitarnya memberikan bantuan ekonomi sebagai respons. Sejak era kepemimpinan Kim Il-sung, Korea Utara mengalami kemajuan ekonomi yang ditopang oleh pengembangan program nuklir secara terencana. Kebijakan ini kemudian dilanjutkan oleh Kim Jong-Il yang secara bertahap melakukan uji coba rudal nuklir untuk memprovokasi negara-negara tetangga, terutama Amerika Serikat dengan tujuan mendapatkan bantuan ekonomi. Hal ini semakin ditegaskan oleh Kim Jong-un yang menyatakan bahwa konstitusi Korea Utara mendukung penggunaan kekuatan nuklir secara penuh untuk mencegah ancaman dari Amerika Serikat. Selama masa kepemimpinannya, Kim Jong-un mengumumkan bahwa program nuklir Korea Utara telah selesai dan berhasil diuji. Langkah ini menimbulkan ketakutan dan ketegangan di antara negara-negara tetangga dan masyarakat dunia. Namun Korea Utara mampu mempertahankan stabilitas ekonominya berkat pengembangan nuklir tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan senjata nuklir adalah pilihan yang didasarkan pada pertimbangan rasional dan logis untuk memaksimalkan keuntungan di tengah situasi global yang kompleks.<sup>5</sup>

Program nuklir yang dijalankan oleh Kim Jong-un bertujuan sebagai strategi untuk digunakan sebagai alat negoisasi dalam memperoleh bantuan ekonomi dari Amerika Serikat. Langkah ini diambil setelah Amerika Serikat menghentikan pasokan makanan dan membekukan bank perdagangan internasional Korea Utara pada tahun 2013. Uji coba rudal tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan posisi tawar Korea Utara di kancah internasional. Selain digunakan sebagai alat negoisasi untuk mendapatkan simpati dari Amerika Serikat dan dunia internasional, Kim Jong-un juga berupaya menunjukkan kepada masyarakat Korea Utara bahwa dirinya sebagai penerus dinasti Kim. Kim Jong-un adalah pemimpin yang bertanggung jawab dan dapat diandalkan. Langkah ini bertujuan untuk memperoleh dukungan dan kepercayaan dari rakyatnya.

Sebagai pemimpin muda, Kim Jong-Un mengambil langkah untuk mengembangkan program nuklir atau strategi *Military First* sebagai upaya menunjukkan kepada dunia internasional bahwa ia mampu menghadapi ancaman dari musuh-musuh negaranya. Dengan persenjataan nuklir yang dimilikinya, Kim Jong-Un merasa yakin dapat mengatasi berbagai konflik dengan negara lain dan

---

<sup>4</sup> Yusmita et al., "PRESIDEN KOREA UTARA."

<sup>5</sup> A Pratomo, "Faktor-Faktor Korea Utara Yang Menyebabkan Gagalnya Reunifikasi Korea Utara Dan Korea Selatan Dalam Kurun Waktu ...," 2020, 1–23, <https://etd.umy.ac.id/id/eprint/154/1/HalamanJudul.pdf>.

menciptakan kekhawatiran di seluruh dunia. Kepemimpinannya yang keras terlihat dari tindakannya mengeksekusi pejabat tinggi atau mengusir mereka, yang bertujuan memberikan peringatan kepada rakyatnya dan dunia bahwa ia adalah pemimpin yang tegas, bertanggung jawab, dan layak dihormati. Tindakan tersebut juga bertujuan untuk menghilangkan keraguan atas kemampuannya dalam memimpin Korea Utara.<sup>6</sup>

Korea Utara menerapkan kebijakan isolasi yang menekankan pada kepentingan domestik, meskipun sering mengesampingkan kekhawatiran negara-negara lain di kawasan, terutama terkait isu nuklir. Kebijakan ini meningkatkan potensi konflik dengan negara-negara penentangannya, seperti Korea Selatan dan Amerika Serikat. Situasi ini semakin jelas ketika pejabat tinggi Korea Utara, termasuk Kim Yo Jong, saudara perempuan Kim Jong-un, menyatakan bahwa hubungan dengan Korea Selatan harus berubah menjadi perlawanan terhadap musuh. Kebijakan isolasi ini berpotensi memperburuk ketegangan dan konflik, terutama karena Korea Utara menolak untuk berkomunikasi atau berdialog mengenai denuklirisasi di Semenanjung Korea. Hal ini semakin meragukan prospek perdamaian di kawasan tersebut, apalagi dengan adanya persetujuan antara Korea Utara dan Amerika Serikat terkait program nuklir. Sanksi PBB terhadap Korea Utara atas program senjata nuklirnya dianggap oleh Korea Utara sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan negaranya. Korea Utara bahkan memandang sanksi tersebut sebagai aksi permusuhan yang mengancam perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea. Sikap Korea Utara terhadap sanksi PBB mencerminkan kebijakan isolasi yang cenderung menolak tanggung jawab, terutama terkait program nuklirnya. Jika kebijakan isolasi ini terus berlangsung, upaya perdamaian di Semenanjung Korea akan terhambat, dan stabilitas keamanan regional semakin terganggu. Langkah isolasi Korea Utara juga berpotensi menciptakan situasi anarki internasional baru di Asia Pasifik, yang dapat memicu respons keliru dari negara-negara besar yang merasa terancam sehingga meningkatkan risiko terjadinya konflik militer terbuka. Untuk mencegah konflik terbuka berupa perang antarnegara, pendekatan diplomasi, dialog, dan perundingan harus terus diutamakan. Komunitas internasional, terutama negara-negara yang memiliki kepentingan terhadap perdamaian di Semenanjung Korea, termasuk ASEAN, perlu mendorong kelanjutan dialog antara Korea Utara, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Melalui ASEAN Regional Forum (ARF), di mana Korea Utara turut menjadi mitra dialog, ASEAN memiliki peran strategis dalam mendukung terciptanya upaya perdamaian tersebut.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Sita Hidriyah, "Kebijakan Isolasi Korea Utara Dan Prospek Ancaman Nuklir Di Semenanjung Korea [North Korea's Isolation Policy and the Prospect of a Nuclear Threat on the Korean Peninsula]," *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis* 9 (2020).

<sup>7</sup> Y Budhyarto, "Korea Utara: Ideologi Dan Kebijakan Ekonomi," *Analisis CSIS*, 1987, <http://journals.csis.or.id/index.php/analisis/article/download/965/814>.

Korea Utara dengan sistem pemerintahan otoriter menerapkan sejumlah kebijakan politik yang mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kebijakan tersebut mencakup pengawasan ketat terhadap aktivitas warga, peningkatan kontrol pemerintah di wilayah perbatasan, hingga penerapan sanksi dan hukuman bagi mereka yang melanggar aturan atau melakukan tindakan ilegal. Kondisi ini menciptakan rasa takut di kalangan masyarakat Korea Utara yang pada akhirnya mengganggu kenyamanan hidup mereka sehari-hari. Kepemimpinan Kim Jong-un yang dikenal keras tidak hanya diterapkan pada masyarakat umum, tetapi juga kepada orang-orang terdekatnya yang memiliki pandangan atau pemikiran berbeda terhadap rezim. Langkah ini diambil oleh Kim Jong-un untuk memperkuat legitimasi kepemimpinannya dengan cara mengontrol penuh kebijakan politik dan sosial di negaranya.

Pengawasan dan kontrol terhadap informasi di Korea Utara jauh lebih ketat jika dibandingkan dengan kondisi yang dirasakan oleh masyarakat pada era Soviet atau negara-negara komunis Eropa Timur. Di wilayah tersebut, penduduk masih memiliki peluang untuk mengetahui sedikit informasi tentang dunia luar. Tingkat kontrol di Korea Utara ini belum pernah terjadi sebelumnya dan semakin memperumit pendekatan terhadap negara ini dengan kebijakan era Perang Dingin.

Selama lebih dari lima dekade, propaganda dan pengawasan sosial yang ketat telah membentuk pandangan, nilai, dan tingkah laku masyarakat Korea Utara menjadi sosialis yang sepenuhnya loyal kepada pemimpinnya. Sejak Kim Jong-Un memimpin, kontrol total melalui berbagai mekanisme berbasis propaganda dan kebohongan telah membentuk masyarakat yang tampak kokoh dan sulit terpengaruh perubahan di permukaan, meskipun kondisi ekonominya sangat buruk. Semua sumber informasi berada di bawah kendali penuh rezim, sementara lingkungan yang tertutup diperkuat oleh sistem pengawasan internal yang ketat. Warga Korea Utara hidup di bawah ancaman pengawasan konstan dan risiko hukuman berat, termasuk pemenjaraan di kamp konsentrasi.<sup>8</sup>

Lingkungan yang penuh ancaman menjadikan perlawanan terhadap rezim nyaris mustahil. Pengawasan ketat bahkan merambah hingga kehidupan pribadi di dalam rumah tangga. Penduduk Korea Utara hanya diizinkan memiliki televisi dan radio yang dapat menangkap siaran lokal saja, sementara pemadaman listrik yang meluas di seluruh negeri semakin membatasi penggunaan perangkat komunikasi tersebut. Keterbatasan akses ini memungkinkan rezim sepenuhnya mengontrol informasi dan memanipulasinya sesuai kehendak, tanpa memberikan ruang bagi sumber informasi alternatif. Meskipun televisi dapat diakses oleh penduduk, perangkat ini tetap dianggap sebagai barang mewah, dan tidak ada data yang dapat dipercaya mengenai jumlah rumah tangga yang memilikinya.

---

<sup>8</sup> Analisis Perubahan Kebijakan Proliferasi Nuklir Korea Utara Pada Era Kim Jong-Un and Rafika Olivia Devana, "Jurnal Analisis Perubahan ... Rafika Olivia...", 2017.

Korean Central Television (KCTV) menyiarkan berita dan program lainnya pada malam hari selama hari kerja, sedangkan program hiburan ditayangkan pada akhir pekan. Siarannya terfokus pada sosok pemimpin dan kegiatannya, dengan pujian yang disebar di seluruh negeri. Selain itu, program ini digunakan untuk menyerang Korea Selatan, Amerika Serikat, Jepang, serta mengingatkan rakyat akan musuh-musuh mereka dan ancaman dari dunia luar. Konten program radio di Korea Utara serupa dengan siaran televisi. Pemerintah memberlakukan aturan ketat untuk memastikan radio hanya dapat menerima siaran resmi dari pemerintah. Mendengarkan stasiun radio asing dilarang keras dan dapat berujung pada hukuman. Radio yang dibeli dari luar negeri harus didaftarkan di kantor polisi dan hanya diperbolehkan disetel pada frekuensi KCBS. Pemeriksaan mendadak sering dilakukan di rumah-rumah untuk memastikan radio hanya menyiarkan program pemerintah, terutama untuk mencegah akses ke siaran asing dari Cina dan Korea Selatan di wilayah perbatasan. Pemerintah bahkan berusaha membatasi akses ke siaran radio asing. Media cetak di Korea Utara sepenuhnya dikendalikan oleh rezim. Rodong Sinmun, media resmi partai, menggambarkan pers sebagai "alat ideologis yang berfungsi untuk mempertahankan dan melindungi pemimpin" sekaligus menyerukan agar pers "mewarnai seluruh masyarakat dengan satu warna, yaitu ideologi revolusioner pemimpin besar."

Pemerintah Korea Utara juga menerbitkan berbagai media cetak lainnya, seperti Minju Choosen, Democratic Korea, Pyongyang Sinmun, dan Pyongyang Daily, serta media yang dirancang khusus untuk remaja dan anak-anak. Namun, semua media ini memuat artikel yang seragam, yang mendukung propaganda negara. Dalam beberapa tahun terakhir, surat kabar-surat kabar ini juga dipublikasikan di internet dengan arahan untuk dibaca setiap pagi sebagai bagian dari "pembelajaran tentang tujuan partai dan tuntutan zaman." Meskipun beberapa warga Korea Utara dapat mengakses internet, jaringan ini bukan internet yang sebenarnya, dan sebagian besar warga mungkin tidak mengetahui keberadaan atau cara mengakses internet. Rezim memandang media ini sebagai ancaman karena dapat merongrong isolasi negara. Hanya sekitar 10 persen kantor yang dilengkapi dengan komputer yang memiliki akses ke internet Korea Utara, yang dikenal dengan nama Kwangmyong.

Meskipun akses terhadap komputer sangat terbatas, penggunaan ponsel telah menjadi lebih umum dalam beberapa tahun terakhir. Namun, pengguna ponsel dilarang melakukan atau menerima panggilan internasional kecuali dengan menggunakan ponsel ilegal. Antara tahun 2004 hingga 2008, penggunaan ponsel sempat dilarang, dan mereka yang ketahuan menggunakannya dilaporkan dikirim ke penjara atau bahkan dieksekusi. Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan otoriter Kim Jong-un di Korea Utara memiliki tujuan yang jelas, baik

untuk memenuhi kepentingan dalam negeri maupun untuk kepentingan di tingkat internasional.<sup>9</sup>

Pada Januari 2020, Korea Utara menjadi salah satu negara pertama yang menutup perbatasannya segera setelah COVID-19 mulai menyebar di negara tetangganya, China. Kebijakan tersebut mencakup pengusiran semua warga negara asing, termasuk diplomat dan pekerja bantuan internasional, serta penghentian total perjalanan masuk, yang menyebabkan isolasi ketat selama lebih dari dua tahun. Kim Jong-un memuji keberhasilan strategi ini, sementara media pemerintah menyoroti "upaya anti-epidemi" yang dilakukan di seluruh negeri.

Namun, seperti yang diperkirakan para ahli virus COVID-19 tetap menyelip masuk. Hal ini dikaitkan dengan adanya wabah di negara-negara tetangga Korea Utara. Para ahli memperkirakan virus tersebut dapat masuk melalui individu yang melintasi perbatasan secara ilegal dari China atau melalui hewan yang terinfeksi, seperti burung atau babi hutan, yang bebas melintasi perbatasan. Bahkan, pada April tahun ini, Korea Utara dan China sempat menanggihkan perdagangan kereta api karena kekhawatiran Pyongyang terhadap potensi infeksi, meskipun pengiriman kargo melalui laut tetap dilanjutkan.

Meskipun Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menawarkan jutaan dosis vaksin Sinovac dan AstraZeneca, Korea Utara menolak untuk menerima vaksin tersebut. Kim Jong-Un juga dilaporkan sering menolak bantuan terkait pandemi, termasuk vaksin, yang datang dari negara tetangga seperti Korea Selatan dan China. Kementerian Unifikasi Korea Selatan, yang mengelola hubungan antarnegara, mengungkapkan bahwa mereka telah menawarkan pasokan medis seperti vaksin, masker, alat uji, serta kerja sama teknis. Namun, tawaran itu belum mendapat respons dari Korea Utara. Usulan ini diajukan tidak lama setelah Presiden Korea Selatan, Yoon Suk-yeol menyatakan kesiapan negaranya untuk membantu Korea Utara dalam mengatasi pandemi. Penolakan ini dilaporkan karena alasan bahwa Korea Utara merasa tidak memerlukan vaksin karena tidak memiliki kasus COVID-19. Selain itu, mereka menyebut banyak negara lain yang lebih membutuhkan vaksin dibandingkan dengan Korea Utara.<sup>10</sup>

Kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Kim Jong-Un menunjukkan fokus utama pada stabilitas rezim, kontrol penuh terhadap masyarakat, dan penguatan posisi Korea Utara di tengah tekanan internasional. Dengan strategi seperti pengembangan nuklir, kontrol informasi, dan isolasi ekonomi, Kim berusaha mempertahankan kekuasaan sekaligus melindungi negara dari pengaruh eksternal yang dianggap mengancam. Namun, kebijakan-kebijakan tersebut juga menciptakan

---

<sup>9</sup> Sofiyatul Khoiriyah, "Analisis Kebijakan Luar Negeri Era Kepemimpinan Kim Jong Un Dan Moon Jae In Terhadap Resolusi Konflik Semenanjung Korea," *Journal of Diplomacy and International Studies* 3, no. 02 (2020): 65–75.

<sup>10</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220520072114-4-340339/ngeri-5-kebijakan-gila-kim-jong-un-demi-nol-covid-di-korut>

tantangan besar, terutama di bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Isolasi yang ketat, baik secara fisik maupun informasi, memperburuk kesenjangan dengan dunia luar, sementara fokus pada militerisme sering kali mengorbankan kebutuhan rakyat. Dalam konteks pandemi COVID-19, pendekatan isolasi total dan penolakan bantuan vaksin mencerminkan sifat rezim yang mengutamakan kontrol ketat di atas kerja sama internasional, bahkan ketika menghadapi krisis kesehatan global. Keseluruhan kebijakan Kim Jong-Un menegaskan pola kepemimpinan otoriter yang didasarkan pada ideologi kemandirian (*Juche*) dan kontrol penuh terhadap rakyat. Namun, di tengah tantangan internal dan tekanan eksternal, keberlanjutan pendekatan ini akan terus diuji di masa mendatang.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Kebijakan yang diterapkan oleh Kim Jong-un sebagai otoritas tertinggi di Korea Utara menunjukkan fokus utama terkait stabilitas rezim, kemandirian nasional, dan penguatan posisi negara di tengah tekanan internasional. Pendekatan ini tercermin dari pengembangan nuklir, kontrol ketat terhadap informasi, serta kebijakan isolasi yang menutup negara dari pengaruh luar. Meskipun kebijakan ini berhasil menjaga legitimasi kekuasaan dan ketahanan negara, dampaknya terhadap ekonomi dan kesejahteraan rakyat sangat signifikan, dengan banyaknya tantangan seperti kelangkaan pangan, keterbatasan akses informasi, dan tekanan internasional. Dalam konteks pandemi, keputusan untuk menolak bantuan vaksin menunjukkan prioritas pada kontrol domestik dibandingkan kerja sama global.

### **DAFTAR RUJUKAN**

- Sofiyatul Khoiriyah, "Analisis Kebijakan Luar Negeri Era Kepemimpinan Kim Jong Un Dan Moon Jae In Terhadap Resolusi Konflik Semenanjung Korea," *Journal of Diplomacy and International Studies* 3, no. 02 (2020): 65–75.
- Y Budhyarto, "Korea Utara: Ideologi Dan Kebijakan Ekonomi," *Analisis CSIS*, 1987, <http://journals.csis.or.id/index.php/analisis/article/download/965/814>.
- Analisis Perubahan Kebijakan Proliferasi Nuklir Korea Utara Pada Era Kim Jong-Un and Rafika Olivia Devana, "Jurnal Analisis Perubahan ... Rafika Olivia...," 2017.
- Sita Hidriyah, "Kebijakan Isolasi Korea Utara Dan Prospek Ancaman Nuklir Di Semenanjung Korea [North Korea's Isolation Policy and the Prospect of a Nuclear Threat on the Korean Peninsula]," *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis* 9 (2020).
- Yusmita et al., "PRESIDEN KOREA UTARA."

A Pratomo, "Faktor-Faktor Korea Utara Yang Menyebabkan Gagalnya Reunifikasi Korea Utara Dan Korea Selatan Dalam Kurun Waktu ...," 2020, 1-23, <https://etd.umy.ac.id/id/eprint/154/1/HalamanJudul.pdf>.

Melysa Arda Yusmita et al., "PRESIDEN KOREA UTARA," 2013, 1-16.

Theofilus Jose Setiawan et al., "Pengayaan Senjata Nuklir Sebagai Modal Ekonomi Korea Utara," *Jurnal Dinamika Global* 6, no. 02 (2021): 212-31, <https://doi.org/10.36859/jdg.v6i2.640>.

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20220520072114-4-340339/ngeri-5-kebijakan-gila-kim-jong-un-demi-nol-covid-di-korut>